



REALOKASI ANGGARAN DISESUAIKAN KEBUTUHAN APBD 2021 Sudah Akomodir PPKM Darurat

YOGYA (KR) - Konstruksi APBD Kota Yogya 2021 dinilai sudah mengakomodir kebutuhan selama pandemi. Termasuk kebijakan PPKM Darurat yang kini diberlakukan hingga 20 Juli 2021 mendatang. Kendati demikian, jika terpaksa harus dilakukan realokasi anggaran maka akan disesuaikan kebutuhan.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menjelaskan APBD 2021 sejak awal pembahasan bersama legislatif sudah disesuaikan dengan kondisi pandemi. "Artinya APBD sudah diskenarioikan untuk mengatasi pandemi baik menyangkut penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Sudah kami siapkan semua tinggal memfokuskan pada hal-hal yang memang menjadi kebutuhan," jelasnya, Rabu (7/7).

Diakuinya kebijakan PPKM Darurat di luar perkiraan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut menjadi keharusan mengingat lonjakan kasus Covid-19 yang begitu cepat dan terus meningkat. Sehingga dibutuhkan pe-

nanganan yang lebih terpadu dan strategis. Akan tetapi dari sisi anggaran baik di level daerah, provinsi maupun pemerintah pusat sudah diskenarioikan untuk mengatasi pandemi.

Kesiapan APBD Kota Yogya 2021 salah satunya dibuktikan dengan tidak ada catatan krusial dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri. Sehingga Kota Yogya tidak masuk dalam rekomendasi untuk melakukan refocusing maupun realokasi, di saat sejumlah daerah harus melakukan perencanaan ulang. "Tetapi kalau memang harus realokasi akibat kondisi mendesak yang tidak terduga, ya akan kita lakukan sesuai kebutuhan," tandasnya.

Realokasi untuk kebutuhan PPKM Darurat pun dipastikan tidak akan mengganggu kegiatan masyarakat yang sudah diagendakan dalam APBD. Pos anggaran yang kelak akan dialihkan mempertimbangkan aspek kemanfaatan yang belum menjadi priori-

tas, salah satunya pos anggaran penyertaan modal maupun pengadaan kendaraan. Meski begitu, kecil kemungkinan akan terjadi realokasi mengingat masih ada silpa dari APBD 2020 yang kelak dapat dimanfaatkan. Nominalnya cukup besar mencapai lebih dari Rp 150 miliar yang bisa dimasukkan dalam APBD 2021.

Dari pencermatan awal, salah satu kebutuhan yang akan menyedot anggaran cukup besar saat PPKM Darurat ialah pemberian bantuan sosial (bansos). Kendati sebagian besar akan diakomodir melalui anggaran pusat dan provinsi, namun Kota Yogya tetap harus menyediakan porsi. Terutama bagi warga sasaran yang tidak masuk dalam data pusat namun menjadi pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS). "Kita sudah minta setiap OPD untuk memantau dampak dari kebijakan baru ini. Dari situ nanti bisa terlihat kebutuhannya apa dan bagaimana kita mengakomodirnya," katanya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005